Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)

Tati wulandari¹, Muhammad Ahyaruddin², R Septian Armel³

¹²³*Universitas Muhammadiyah Riau*

E-mail : 180301115@student.umri.ac.id, ahyaruddin@umri.ac.id, septianarmel@umri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Nagari Lubuk Basung. Informan Penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari Lubuk Basung. Informan penelitian terdiri dari 10 nasumber yaitu terdiri dari 4 aparatur nagari 1 aparatur dinas sosial dan 5 masyarakat penerima Bantuan Lansung Tunai. Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana data primer berupa observasi dilapangan dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsipan yang ada dikantor Walinagari Lubuk Basung. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik penjamin keabsahan data yaitu teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Lubuk Basung sudah transparan dan efektif . Penyaluran BLT-DD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karna mampu memenuhi kebutuhan mereka di masa pandemi.

Kata Kunci : Transparansi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. (Riuniliu Tioma,2020).

Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi covid-19 berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengurangi pertumbuhan Ekonomi karena aktivitas ekonomi yang terbatas di tingkat makro yang merupakan penyebab dari banyaknya penduduk kehilangan pekerjaan dan turunnya pertumbuhan ekonomi penduduk sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk Miskin.

Pemerintah dalam mengupayakan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat yaitu dengan mengadakan program BLT Dana Desa. Sebagian besar masyarakat desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa, para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan

karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi. Namun Ada juga pihak yang menganggap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat Bantuan Sosial (bansos) dari pemerintah desa. Pada masa pandemi ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai program bansos. Namun, tetap ada keraguan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin dan terdampak. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga klaster (Riska Firdaus,2022).

Di Nagari Lubuk Basung Transparansi penyaluran BLT Dana Desa masih dianggap kurang oleh masyarakat sekitar Pengadaan BLT-DD sejak awal disosialisasikan sudah memunculkan kontroversi, banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan BLT DD. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat banyaknya perekrutan dan penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
2. Keluarga non penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
3. Masyarakat kehilangan mata pencaharian.
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau dari APBN.
5. Mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/ kronis.
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Berbagai tantangan pun harus diatasi desa/Nagari dalam proses penyaringan ini. Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) “tentang syarat penerima BLT-DD pada peraturan desa, bahwa penerima BLT DD adalah masyarakat desa setempat yang masuk dalam pendataan RT dan RW yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun/kronis dan/atau masyarakat yang belum memperoleh Bansos, baik yang bersumber dari PKH, kartu sembako, paket sembako atau kartu pra kerja, dan/atau masyarakat belum terdata dikarenakan terjadi error data, baik NIK atau pun sistem pendataannya” (Tioma Roniuli,2020). Ada desa yang memilah sebelum melakukan pendataan, tetapi ada pula desa yang melakukan pendataan langsung dengan mendatangi rumah warga. Pemilahan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah masalah tersebut mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

Selain dari pada itu, terkait pendataan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Lubuk Basung belum efektif karna seringnya terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Transparansi data juga menjadi masalah penting yang

patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak atau tidak masuk kriteria dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Basung

Laki-Laki	23,781 orang
Perempuan	23,283 orang
Jumlah total	47,064

Sumber : Kantor Walinagari Lubuk Basung

Berikut merupakan jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Lubuk Basung tahun 2020 dan 2021 Sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai

No	Tahun	Jumlah Penerima (per KK)
1	2020	226
2	2021	70

Sumber : Kantor Walinagari Lubuk Basung

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan langsung tunai pada tahun 2020 sebanyak 226 orang dan tahun 2021 sebanyak 70 orang. Menurut data yang di dapat dari bagian pelayanan pelaksanaan BLT di kantor walinagari lubuk basung yaitu ibu Devi Lusiana dimana pengurangan jumlah penerima manfaat BLT terkendala karena anggaran pemerintah yang kurang dari tahun sebelumnya. Untuk penyaluran BLT sendiri di Nagari Lubuk Basung padatahun 2020 sebanyak Rp 813.600.000 dan untuk penyaluran pada tahun 2021 sebanyak Rp 252.000.000.

Tabel 1.3
Penyaluran BLT Dana Desa di Nagari Lubuk Basung Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Jumlah
2020	Rp 813.600.000
2021	Rp 252.000.000

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Pada tabel diatas dapat dilihat penurunan anggaran yang terjadi antara tahun 2020 dan tahun 2021. hal ini disebabkan karna mempertimbangkan keuangan negara. beberapa warga mempertanyakan transparansi penyaluran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Transparansi

Menurut Mardiasmo dikutip oleh Valencia (2018) transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan

informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi dan penjabarannya. Menurut Setyawan (2015) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Nisak, 2017).

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah sebuah musibah yang sedang dihadapi oleh dunia karena virus yang sangat mematikan yang sudah merenggut jutaan korban jiwa. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau coronavirus disease

2019 adalah virus baru yang berasal dari virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah ini juga menjadikan seluruh kegiatan dan perekonomian dunia terguncang sehingga seluruh manusia di dunia harus menghadapi seleksi alam new normal atau peradaban dunia baru, hanya manusia-manusia yang kuat dan memiliki imunitas tinggi yang dapat bertahan hidup.

Dana Desa

Apa itu dana desa? Menurut Undang-Undang Desa, yang dimaksud dengan dana desa yakni dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai pembiayaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, pelaksanaan pembangunan atau mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan penggunaan kemasyarakatan. Selain bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dana desa juga memiliki tujuan lain yakni mengentaskan kemiskinan (Setyawan,2017).

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berupa bantuan uang tunai atau dapat juga beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi (Kurniawan, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 sampai 28 Juli 2022 menggunakan metode semiterstruktur dan terbuka. Karena peneliti sudah menentukan informan penelitian sebelum terjun kelapangan. Informan penelitian ini terdiri dari 10 orang. 10 informan tersebut terdiri dari Walinagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pelayanan Nagari, staf nagari, Kasi pelayanan data kantor dinas sosial, 5 orang masyarakat penerima BLT Dana Desa. Ada 2 orang laki-laki dan 8 orang wanita yang terlibat dalam wawancara tersebut. Lama waktu wawancara berkisar 15-30 menit.

Data kualitatif ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data dengan memakai triangulasi sumber dimana teknik yang digunakan peneliti untuk menguji data kualitatif untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, arsip, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan pemahaman dari hasil kualitatif yang didapat peneliti saat melakukan wawancara dilapangan dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil dari penelitian kualitatif bahwasannya terdapat hasil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Mengetahui Mekanisme Program BLT-DD di Nagari Lubuk Basung

Mekanisme program BLT-DD dimaksudkan dengan tujuan sebagai upaya agar penyaluran dan pencairan BLT-DD berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya pemerintahan nagari akan menghimpun data terlebih dahulu, melihat masyarakat mana saja yang termasuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020, Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna :

1. Mekanisme pendataan BLT-DD yang pertama akan dilakukan oleh petugas nagari namun ada pula bantuan dari relawan covid dan jorong beserta kaki tangannya. Setelah data terkumpul selanjutnya, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT dan RW.
2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah nagari khusus. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh kepala walinagari.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu bupati melalui camat.

5. Program BLT-DD bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima dari kecamatan.
6. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode tunai. Dalam hal ini kepala nagari berlaku sebagai penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa.
7. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020.
8. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 Per bulan untuk tahap pertama.

Perwujudan kewajiban pemerintahan nagari Lubuk Basung dalam mekanisme program BLT-DD Dinagari Lubuk Basung, Dimana di setiap dusun dipimpin oleh wali jorong dan Dalam proses pendataan, peran Jorong sangat berpengaruh karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan Pemerintah Nagari dalam menentukan penerima BLT Dana Desa berikut yang diutarakan oleh ibu Hidayati Amir selaku sekretaris walinagari :

“Bapak Walinagari menugaskan jorong untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan, Wali Jorong mendata masyarakat yang berhak mendapat bantuan ini asal sesuai dengan kriteria pemerintah. Nama-nama masyarakat yang di pilih di datangi rumahnya untuk dimintai KTP dan KK. Setelah di data maka hasil data yang di dapat di berikan ke Kantor Walinagari dan Nagari yang akan memutuskan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, karena tidak semua nama yang di usulkan akan menerima bantuan tersebut. Setelah nama-nama penerima bantuan terpilih, maka wali jorong ditugaskan memberikan surat undangan kepada penerima bantuan”. Dan selanjutnya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab 1 berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai mekanisme program BLT-DD dinagari Lubuk Basung. Mekanisme program BLT-DD dinagari Lubuk Basung dapat dikatakan berhasil karena telah mengikuti mekanisme pendataan yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana salinan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penelitian ini nagari Lubuk Basung telah melakukan mekanisme Program BLT-DD dengan baik dan sudah melakukan validasi terkait siapa-siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Mengetahui Penyaluran dan Pencairan Dana BLT-DD di Nagari Lubuk Basung

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Penyaluran dan Pencairan dana merupakan kegiatan penting karena merupakan kegiatan utama yaitu sampainya dana BLT sebesar Rp 300.000 ketangan masyarakat. Berikut yang diutarakan ibu Devi Lusiana selaku kasi pelayanan walinagari :

“Untuk proses pencairan dan penyaluran walinagari melakukan sosialisasi terlebih dahulu, lalu dari pihak nagari pada tahap pertama membuat undangan untuk masyarakat penerima, dan memberikan kepada masyarakat sebagai bukti penerima BLT-DD dan ada juga walinagari meminta jorong langsung datang kelapangan (ke rumah-rumah waga) untuk menyampaikan bantuan atau melakukan pencairan dana BLT kepada masyarakat sesuai

dengan data kemarin, jadi langsung secara tunai jorong memberikan uang bantuan dan langsung serah terima dengan yang bersangkutan, dan jika masih ada juga masyarakat yang kurang paham mengenai informasi penyaluran dan pencairan masyarakat bisa melihat di papan informasi nagari”

Dan hal ini juga diperkuat oleh ibu Hidayati Amir S.Pd selaku sekretaris nagari :

“untuk penyaluran dana BLT kami perangkat nagari mengutus perangkat desa untuk menyampaikan undangan kepada masyarakat mengenai jadwal pencairan dana BLT-DD”

“benar,petugas nagari datang ke kami memberikan undangan untuk mengambil dana bantuan ke kantor dan kami juga bisa melihat informasi tersebut di papan informasi nagari” (masyarakat penerima bantuan, ibu Yuliasmi)

Dan jawaban tadi juga ditambahkan oleh masyarakat penerima bantuan ibu Yola Angresia :

“Untuk proses penyaluran dan pencairan kadang kadang undangan kami yang mengambil ke rumah rk”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat nagari seperti ibu sekretaris dan ibu Kasi Pelayanan serta masyarakat penerima bantuan bahwa proses penyaluran dan pencairan disampaikan kepada masyarakat melalui surat undangan dan langsung diberikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Hasil penelitian yang didapat peneliti dari perangkat nagari dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD di nagari Lubuk Basung berjalan dengan baik dan relevan karena nagari Lubuk Basung dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan cara memberikan surat undangan langsung kepada masyarakat dan bisa juga dilihat di papan informasi yang ada di kantor wal nagari Lubuk Basung.

Mengetahui Sikap dan Respon masyarakat terhadap program BLT yang Berlangsung

BLT-DD diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan dari pemerintah di masa pandemi covid-19. Sikap positif masyarakat yang ditunjukkan dari masyarakat yang merasa sangat dibantu dengan adanya BLT. Masyarakat sangat terbantu dengan program BLT-DD karena mampu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Jawani sebagai penerima bantuan BLT-DD :

“bantuan ini sangat membantu saya sekali, dengan adanya bantuan ini kebutuhan saya di masa pandemi kurang lebihnya bisa tercukupi karnakan dikasih setiap bulan, senanglah pemerintah sangat memperhatikan kami di masa masa corona”

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Yuliasmi :

“jujur ini sangat membantu kami karena pada saat virus corona datang ekonomi kami sangat sulit,pemasukan berkurang, karnakan pada saat itu kami dilarang untuk beraktifitas jadi untuk biaya pun kami sulit, dengan adanya petugas yang datang dan mendata, kami sangat merasa senang setidaknya bantuan dari pemerintah membantu masyarakat yang terkendala ekonomi saat adaanya virus corona, karnakan kebanyakan disini orang-orang pekerjaannya

buruh, bertani dan berkebun jadi karna kami tidak bisa keluar rumah kebutuhan kami tidak tercukupi, dan BLT-DD ini sangat sangat membantu sekali”

Sikap masyarakat yang merasa terbantu membuat masyarakat mendorong sepenuhnya terhadap program BLT-DD. Bantuan berupa uang dan bersifat tunai membuat masyarakat semakin leluasa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Bantuan berupa uang dirasa lebih berguna dari pada berbentuk barang karena kualitas dari barang yang dibagikan belum tentu bagus dan kalau diuangkan tidak sebesar yang dibutuhkan.

Jadi dari temuan yang telah diuraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, Peneliti menyimpulkan sikap dan respon masyarakat terhadap program BLT-DD dinagari lubuk basung sangat baik dan bahkan sangat mendukung adanya program ini dikarenakan sangat membantu masyarakat untuk meringankan beban ekonomi.

Mengetahui Kendala dalam pelaksanaan pemberian Program BLT-DD di Nagari Lubuk Basung

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah mempunyai peranan yang penting untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada semua masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan dilakukan dengan baik pula serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan BLT-DD di nagari lubuk basung dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya ada faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pemerintah nagari dalam menyalurkan BLT. Sebagaimana dikatakan oleh ibuk Devi Lusiana selaku aksi pelayanan nagari :

“untuk kendala mungkin pada saat verifikasi data karna setelah dicek kembali banyak masyarakat yang nama nya terdaftar ganda sebagai penerima bantuan, namun itu tidak berlangsung lama, dan untuk penyalurannya pun petugas langsung yang datang kelapangan, dan untuk kesesuaian datapun kami tim nagari benar benar mensortir apakah dari data yang masuk ada penerima ganda, karna jika kami menemui masyarakat penerima ganda, maka kami harus mengulang lagi mengecek data data tersebut dan mengeluarkan dari daftar penerima BLT”

Dan menurut masyarakat penerima bantuan yola agresia :

“tidak ada, karna ditahap awal penerima bantuan petugas walinagari langsung yang datang menghantarkan bantuan kerumah rumah warga, mungkin sesuai data yang mereka data kemarin, jadi kami hanya dirumah tidak perlu pergi ke kantor walinagari mengambil bantuan BLT-DD”

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan program BLT-DD dinagari lubuk basung melalui wawancara dengan perangkat nagari terdapat sedikit kendala yaitu dalam verifikasi data penerima BLT karna masih banyak terdapat penerima ganda.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian penelitian kedepannya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain :

1. Keterbatasan informan atau narasumber. Masih banyak yang bisa dimasukan kedalam daftar informan atau narasumber seperti perangkat pemerintah yang bekerja di lembaga pemerintah seperti kantor camat dan Bamus (Badan Permusyawaratan).
2. Keterbatasan waktu penelitian sehingga tidak dapat melihat dengan jelas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari awal pendataan sampai penyaluran kepada masyarakat.
3. Keterbatasan objek penelitian sehingga peneliti tidak dapat membandingkan antara BLT Dana Desa di Desa 1 dengan BLT Dana Desa lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terdampak Covid-19 (Studi Kasus Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam). Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dan menggunakan teknik Keabsahan data dengan Metode Triangulasi Sumber. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Program BLT-DD di Nagari Lubuk Basung disimpulkan dapat dikatakan berhasil karena telah mengikuti Mekanisme pendataan yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana salinan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penelitian ini nagari lubuk basung telah melakukan mekanisme Program BLT-DD dengan baik dan sudah melakukan validasi terkait siapa-siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.
2. Penyaluran dan Pencairan dana BLT-DD di Nagari Lubuk Basung dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD di nagari lubuk basung berjalan dengan baik dan relevan karena nagari lubuk basung dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
3. Sikap dan Respon masyarakat terhadap Program BLT-DD di Nagari Lubuk Basung Peneliti menyimpulkan sikap dan respon masyarakat mengenai program BLT-DD sangat baik dan bahkan sangat mendukung adanya program ini dikarenakan sangat membantu masyarakat untuk meringankan beban ekonomi.
4. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Program BLT-DD di Nagari Lubuk Basung dapat disimpulkan bahwa kendalanya terdapat pada saat verifikasi data nama penerima bantuan BLT dimana masih terdapat penerima ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan. (2020). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dampak Pandemi Covid-19. *Catatan Penelitian*, No 4.
- Setyawan , I. (2017). *Kebijakan Pemerintah*. Universitas Singaperbangsa Karawang: Vol 2.
- Nisak, A. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. E-Journal Ekonomi dan Akuntansi: IV(2), 148-152.
- Riuniliu, T. (2020). Transparansi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Journal of Law and Islamic Law*, Vol (1)
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.